

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat dua agenda penting pemerintah berkenaan dengan bidang pendidikan, yaitu; peningkatan mutu Pendidikan Nasional dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan agenda tersebut, pemerintah melalui beberapa kebijakannya berupaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, di antaranya adalah kebijakan pendanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dinyatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” (Fahrurrozi, *Media Pendidikan*. XII No 2 2012/1433: 224).

Penerapan peraturan dan sistem manajemen keuangan yang baku dalam lembaga pendidikan tidak dapat disangkal lagi. Permasalahan terjadi di dalam lembaga terkait manajemen keuangan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis di dalam rencana strategis lembaga pendidikan. (Abubakar dan Taufani C. Kurniatun dalam *Buku Manajemen Pendidikan*, Tim Dosen Administrasi UPI, 2015: 256)

Terkait dengan manajemen keuangan madrasah, sumber pendapatan dari Madrasah Tsanawiyah Pesantren Pembangunan Cigaru, Majenang, Cilacap diperoleh dari wali murid melalui komite madrasah yang berupa Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) tiap bulan, Infak jariyah satu tahun sekali atau yang biasa dikenal dana pembangunan madrasah (Surat Pemberitahuan Hasil Rapat Komite dan Ulangan Akhir Semester Gasal, MTs.8/13/PP.005/118/2016), dan bantuan operasional sekolah dari pemerintah (BOS) pusat (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah RKAM MTs Pesantren Pembangunan Majenang Tahun Pelajaran 2015-2016).

Biaya SOP tiap bulan pada tahun 2016 di MTs Pesantren Pembangunan Majenang yaitu Rp 30.000. hal tersebut diketahui pada laporan pertanggungjawaban SOP MTs Pesantren Pembangunan Majenang Tahun Pelajaran 2015-2016. Sedangkan biaya pada tahun pelajaran 2016-2017 yaitu sebesar Rp 35.000. Biaya Jariyah untuk tahun 2016-2017 yaitu Rp 350.000 untuk kelas 7, Rp 225.000 untuk kelas 8, dan Rp 150.000 untuk kelas 9 Hal tersebut tercantum pada surat pemberitahuan hasil rapat pleno Komite dan UAS pada tanggal 21 November 2016 (MTs.8/13/PP.00.5/118/2016).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di dapatkan dalam triwulanan atau empat kali dalam satu tahun. Dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah MTs Pesantren Pembangunan Cigaru, Majenang Tahun pelajaran 2015/2016 jumlah penerimaan dana nya yaitu sebesar Rp 1.130.005.000. uraian dana nya yaitu Bantuan Operasional Sekolah Rp 735.000.000, kemudian Pendapatan Asli

Sekolah antara lain: SPP sebesar Rp 253.080.000 dan Infak Jariyah sebesar Rp 141.925.000 (RKAM MTs Pesantren Pembangunan Majenang Tahun 2015/2016).

Sedangkan jumlah pengeluarannya sebesar Rp 1.130.005.000, pengeluaran digunakan untuk program madrasah dan belanja lainnya. Program madrasah yaitu program pengembangan standar pendidikan. Uraianya adalah Rp 61.428.000 untuk pengembangan kompetensi lulusan, Rp 500.000 untuk pengembangan Kurikulum/KTSP (standar isi), Rp 107.060.000 untuk pengembangan proses pembelajaran (standar proses), Rp 7.400.000 untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, Rp 70.200.000 untuk pengembangan sarana dan prasarana madrasah, Rp 35.460.000 untuk pengembangan dan implementasi manajemen madrasah, Rp 306.351.600 untuk Pengembangan dan panggilan sumber dana pendidikan (standar Pembiayaan) dan Rp 45.212.000 untuk pengembangan dan Implementasi sistem penilaian. Kemudian untuk belanja lainnya sebesar Rp 494.393.300 (RKAM MTs Pesantren Pembangunan Majenang Tahun 2015/2016).

Laporan pertanggung jawaban SOP tahun 2015/2016 berjumlah sebesar Rp 930.693.986 pada kolom pemasukan dan Rp 919.674.986 pada kolom pengeluaran. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa madrasah memiliki saldo lebih sebesar Rp 11.019.000. Madrasah Tsanawiyah Pesantren Pembangunan berbeda dengan madrasah lain, yang biasanya jumlah anggaran sama dengan jumlah pengeluaran atau bahkan kekurangan dana, justru madrasah ini memiliki saldo lebih yang berarti pengalokasian dana saat penganggaran keuangan madrasah terserap dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan madrasah. Rencana

Kegiatan dan Anggaran Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Pembangunan Majenang ternyata belum ditanda tangan oleh Komite Madrasah dan Kepala Sekolah. Karena itu perlu diteliti bagaimana proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah, dan mengapa dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah tahun 2016/2017 belum ditanda tangan?

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini diarahkan upaya menyelidiki masalah perencanaan anggaran keuangan di MTs Pesantren Pembangunan. Penelitian ini selanjutnya diberi judul “**Penganggaran Keuangan Madrasah**” (*Penelitian di MTs Pesantren Pembangunan Cigaru, Majenang, Cilacap*)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas ialah:

1. Bagaimana profil MTs Pesantren Pembangunan Majenang, Cilacap?
2. Bagaimana Mengidentifikasi kegiatan dan sumber yang dinyatakan dalam uang di MTs Pesantren Pembangunan Majenang?
3. Bagaimana menyusun *budgeting* di MTs Pesantren Pembangunan Majenang?
4. Bagaimana revisi anggaran di MTs Pesantren Pembangunan Majenang?
5. Bagaimana persetujuan anggaran di MTs Pesantren Pembangunan Majenang?
6. Bagaimana pengesahan anggaran di MTs Pesantren Pembangunan Majenang?

7. Bagaimana implementasi prinsip manajemen keuangan dalam penyusunan anggaran keuangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui profil MTs Pesantren Pembangunan Majenang, Cilacap
2. Untuk mengetahui cara mengidentifikasi kegiatan dan sumber yang dinyatakan dalam uang di MTs Pesantren Pembangunan Majenang.
3. Untuk mengetahui penyusunan *budgeting* di MTs Pesantren Pembangunan Majenang.
4. Untuk mengetahui revisi anggaran di MTs Pesantren Pembangunan Majenang.
5. Untuk mengetahui persetujuan anggaran di MTs Pesantren Pembangunan Majenang.
6. Untuk mengetahui pengesahan anggaran di MTs Pesantren Pembangunan Majenang.
7. Untuk mengetahui implementasi prinsip manajemen keuangan dalam penyusunan anggaran keuangan.

Adapun Kegunaan penelitian ini yaitu untuk:

1. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian diharapkan mampu memperkuat dan mengembangkan teori-teori tentang pengelolaan keuangan di madrasah.
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan konsep pengelolaan keuangan di madrasah.

D. Kerangka Pemikiran

Pendidikan memiliki tujuan yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan ini tentu saja meliputi pelbagai pendidikan yang ada di Indonesia baik itu pendidikan formal maupun nonformal. Setiap lembaga pendidikan memiliki tujuan masing-masing yang menjadikan manajemen sebagai fungsi dalam mencapai tujuannya secara efektif. Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 telah menetapkan standar-standar nasional pendidikan yang salah satunya yaitu tentang standar pembiayaan pendidikan (Jaja, 2013: 91).

Salah satu komponen yang penting yaitu manajemen keuangan/pembiayaan pendidikan. Dana memainkan peran penting dalam pendidikan pada tiga area: *pertama*, ekonomi pendidikan dalam kaitannya dengan pengeluaran masyarakat secara keseluruhan; *kedua*, keuangan sekolah kaitannya dengan kebijakan sekolah untuk menterjemahkan uang terhadap layanan kepada peserta didik; dan *ketiga*, pajak administrasi bisnis sekolah yang harus diorganisir secara langsung berkaitan dengan tujuan kebijakan. Pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam mungkin tak terhingga. (Mulyasa, 2013: 195)

Pembiayaan pendidikan, merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Seperti, dikemukakan oleh Thomas John (1985: 20), yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, dari mana sumbernya, dan untuk apa dibelanjakan serta siapa yang membelanjakan (Akdon, 2015: 23).

Manajemen Keuangan Sekolah (pembiayaan sekolah) pada dasarnya merupakan bagian dari pembiayaan pendidikan yang tercermin dari anggaran yang ditetapkan oleh sekolah, sehingga untuk bidang ini diperlukan penanganan yang serius, agar dicapai suatu proses pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mengelola anggaran serta program-program yang dibiayai dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah (Uhar, 2010: 270).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pembiayaan, yang dimaksud dengan standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun (Pasal, ayat 10). Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal (Pasal 62, ayat 1) (Fattah, 2016: 93).

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri.

Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar (Fattah, 2012: 23).

Biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya. Menurut Permendiknas no 69 tahun 2009, yang termasuk ke dalam biaya pendidikan, antara lain Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS), Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai (BHAP), Biaya pemeliharaan dan perbaikan, Biaya daya dan jasa, Biaya transportasi/ perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktik kerja industri dan biaya pelaporan (Fattah, 2016: 96).

Anggaran menyediakan konteks bagi proses perencanaan atau seperangkat kegiatan yang berdasarkan jenis manusianya dan dapat diterapkan. Selanjutnya anggaran menjadi dokumen yang merangkum keputusan-keputusan rencana. Dalam hal ini anggaran bertindak sebagai alat untuk menjamin kehati-hatian dan kejujuran dalam mengutus dana publik. Anggaran merupakan dokumen publik yang bisa saja dipelajari oleh orang di luar sistem (Fattah, 2016: 56).

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Anggaran sebagai rencana operasional yang dalam satuan uang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Pada dasarnya penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan antara

puncak pimpinan dengan pimpinan dibawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. (Akdon, 2015: 78)

Menurut Nanang Fattah (2016: 55) Salah satu komponen manajemen keuangan yaitu prosedur penyusunan anggaran dan akan disebutkan sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran; (2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang; (3) Semua sumber-sumber dinyatakan dalam uang, jasa dan barang; (4) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial; (5) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang; (6) Melakukan revisi ulang anggaran; (7) Persetujuan usulan anggaran; (8) Pengesahan anggaran.

Sumber-sumber biaya pendidikan antara lain dari (1) pemerintah seperti APBN dan APBD; (2) sekolah (iuran siswa); (3) masyarakat (sumbangan); (4) dunia bisnis (perusahaan); dan (5) hibah (Dadang, *et al.*, 2012: 21).

Untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan madrasah maka dalam pembiayaan madrasah yang efektif harus memperhatikan prinsip manajemen pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut: (1) Akuntabilitas (*Accountability*); (2) Transparan (*Transparency*); (3) Integritas (*Integrity*); (4) Konsistensi (*Consistency*); (5) Efektif dan Efisien.

Dalam skripsi ini akan dibahas Profil MTs Pesantren Pembangunan Majenang, Cilacap, mengidentifikasi kegiatan dan sumber yang dinyatakan dalam uang, menyusun *budgeting*, revisi anggaran di Madrasah Tsanawiyah Pesantren

Pembangunan Majenang, persetujuan anggaran di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Pembangunan Majenang, dan pengesahan anggaran di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Pembangunan Majenang, dan implementasi prinsip manajemen keuangan pada penganggaran di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Pembangunan Majenang, Cilacap. Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca maka dibuat skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran Penganggaran Keuangan Madrasah

(Penelitian di MTs Pesantren Pembangunan Majenang, Cilacap)

